

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era bisnis yang berkembang semakin pesat seperti saat ini menimbulkan persaingan bisnis yang begitu ketat antar perusahaan agar dapat bertahan (*going concern*). Keadaan ini menuntut perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasinya supaya perusahaan dapat terhindar dari suatu risiko. Risiko sendiri memiliki makna kata yang berkonotasi negatif. Suatu risiko muncul akibat kondisi ketidakpastian. Sebagai contoh, dalam kegiatan investasi dapat mendatangkan keuntungan apabila dilakukan analisa terlebih dahulu. Disisi lain, investasi juga dapat menyebabkan kerugian jika suatu saat harga saham perusahaan tersebut turun yang disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya kegagalan mengelola risiko.

Fenomena kegagalan mengelola risiko pernah dialami *Enron* dan *Worldcom*, yaitu perusahaan yang bergerak dalam industri energi. Perusahaan tersebut melakukan diversifikasi usaha yang menyebabkan proses transparansi sulit untuk diterapkan. Selanjutnya, perusahaan melakukan tindakan yang membuat laporan keuangan mereka seolah-olah dalam keadaan baik. Taktik mereka akhirnya diketahui oleh investor dan terungkap bahwa keuntungan sesungguhnya yang mereka dapatkan tidak sebesar yang dilaporkan. Hal tersebut menyebabkan harga saham turun drastis dan

perusahaan mengalami kebangkrutan. Perusahaan *Enron* dan *Worldcom* menjadi bukti bahwa perusahaan yang hanya menyajikan informasi *financial* belum menjamin kesinambungan usaha tersebut (Devi dkk, 2016). Oleh karena itu, pengungkapan informasi *nonfinancial* juga dinilai penting dalam pertimbangan keputusan investasi.

Fenomena risiko bisnis yang terjadi di Indonesia pernah dipublikasikan oleh *Indonesia Risk Management Professional Association* (IRMAPA) pada 18 Februari 2019 yaitu kasus risiko strategis yang gagal dikelola dari PT. Asuransi Jiwasraya (persero) yang dinilai rentan terhadap kelangsungan bisnis asuransi kedepannya. Pada awalnya perusahaan menawarkan suatu program yang dapat memberikan imbal hasil investasi dengan presentasi tinggi yang membuat ribuan nasabah tertarik untuk ikut dalam program tersebut, sehingga premi asuransi yang diperoleh perusahaan melonjak. Akan tetapi, perusahaan tidak mendapat imbal hasil investasi aset seperti yang mereka harapkan dan membuat perusahaan tidak mampu untuk membayar klaim yang mulai jatuh tempo. Laba bersih perusahaan diketahui menurun menjadi sekitar Rp 360 milyar karena ada kenaikan cadangan premi.

Kasus *fraud* juga pernah dialami oleh salah satu perusahaan manufaktur yang terjadi di PT. Kimia Farma, Tbk (Devi dkk, 2016). Kasus ini bermula pada saat perusahaan mengemukakan hasil audit tanggal 31 Desember 2001 yang diaudit oleh Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM), tetapi BUMN dan Bapepam menilai bahwa laporan keuangan tersebut mengandung rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002

laporan keuangan perusahaan disajikan kembali dan hasilnya ditemukan bahwa keuntungan sebenarnya yang diperoleh perusahaan tidak sebesar seperti yang telah dilaporkan. Fenomena-fenomena kegagalan mengelola risiko yang bahkan melibatkan perusahaan yang telah berumur ratusan tahun seperti *Enron* menunjukkan lemahnya pengungkapan *enterprise risk management* yang seharusnya dapat membantu mengontrol aktivitas manajemen untuk meminimalisir terjadinya *fraud* baik di negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia.

Menurut survei yang dilakukan *Center for Risk Management Studies* (CRMS) Indonesia di tahun 2018, penerapan Manajemen Risiko di Indonesia berada pada tingkat kematangan yang Baik (29,78%) dan Menengah (26,78%). Namun, menurut data *Asian Corporate Governance* (ACGA) pada tahun yang sama menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tata kelola perusahaan yang paling buruk diantara negara Asia Pasifik khususnya negara-negara ASEAN lainnya.

Tabel I. 1***ACGA Market Ranking and Scores 2018***

<i>Market</i>	<i>Total %</i>	<i>Key CG reform themes and question</i>
1. Australia	71	<i>Bank governance needs overhaul, time for a federal ICAC.</i>
2. Hong Kong	60	<i>Going backwards on DCS, about to go forwards on audit regulation.</i>
3. Singapore	59	<i>Going backwards on DCS, reform direction reflect contradictory ideas.</i>
4. Malaysia	58	<i>Can new government rid the system of corruption and cronyism.</i>
5. Taiwan	56	<i>Moving forward, yet piecemeal reforms hinder progress.</i>
6. Thailand	55	<i>Moving forward, yet corruption and decline in press freedom are concerns.</i>
7. India,	54	<i>Bank governance needs overhaul, new audit regulator disappoints.</i>
8. Japan	54	<i>Heavy focus on soft law needs to be balanced with hard law reforms.</i>
9. Korea	46	<i>Stewardship code gaining traction, but sadly so is DCS.</i>
10. China	41	<i>Reinforcement of Party Committeess raises numerous questions.</i>
11. Philippines	37	<i>CG reform low on the government's priorities, direction unclear.</i>
12. Indonesia	34	<i>CG reform low on the government's priorities, direction unclear.</i>

Sumber: *Asian Corporate Governance Association*

Dari data diatas menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum maksimal dalam melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dalam hal ini, Indonesia harus meningkatkan kualitas *corporate governance* seperti yang terdapat pada PSAK 60 instrumen keuangan tentang pengungkapan yang mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi sehingga para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan.

Setiap perusahaan perlu menetapkan strategi dan menyesuaikannya secara berkala agar dapat menghadapi segala tantangan dan peluang yang selalu berubah. Untuk melakukan hal tersebut, perusahaan membutuhkan kerangka kerja untuk mengoptimalkan strategi dan kinerja. Di situlah manajemen risiko perusahaan berperan. Akan tetapi, penerapan manajemen risiko di Indonesia dinilai belum maksimal. Beberapa sektor industri sudah mempunyai aturan sendiri terkait manajemen risiko, salah satunya pada sektor perbankan karena sektor ini mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan sektor lain (Pamungkas, 2019). Sedangkan, pada perusahaan nonkeuangan untuk penerapan manajemen risiko dinilai belum efektif karena pelaksanaannya masih digabungkan dengan praktik *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut kerangka kerja yang dikemukakan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO, 2017) menyatakan fakta bahwa risiko tidak boleh dilihat semata-mata sebagai kendala dalam menetapkan dan melaksanakan strategi. Namun, perubahan yang mendasari risiko dan respons organisasi terhadap risiko dapat menimbulkan peluang strategis untuk kemajuan perusahaan.

Manajemen memegang tanggung jawab keseluruhan untuk mengelola risiko pada entitas, tetapi penting bagi manajemen untuk meningkatkan hubungan dengan *stakeholder* tentang penggunaan manajemen risiko perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif sebagai bagian dari penyempurnaan strategi. Manajemen perlu mengetahui perspektif pada keunggulan dan kelemahan strategi saat kondisi berubah dan seberapa cocok

penerapan strategi dengan visi dan misi perusahaan. Hal ini mengharuskan manajemen untuk memeriksa strategi alternatif dan mempertimbangkan masukan dari *stakeholder* yang akan menerapkan strategi tersebut. Manajemen risiko perusahaan dapat memberikan cara yang efektif bagi manajemen untuk memenuhi perannya dan untuk mengetahui bahwa perusahaan telah mempertimbangkan risiko yang dapat memengaruhi strategi dan mengelolanya dengan baik (COSO, 2017). Pengungkapan manajemen risiko perusahaan juga dapat membantu menciptakan dan menanamkan kepercayaan pada pemangku kepentingan yang menuntut pengawasan yang lebih cermat dari sebelumnya tentang bagaimana risiko secara aktif ditangani dan dikelola.

Oleh karena itu, penelitian mengenai pengungkapan manajemen risiko perusahaan sangat menarik untuk dilakukan di Indonesia. Penerapan manajemen risiko perusahaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, meningkatkan reputasi perusahaan, memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran, dan meningkatkan hubungan dengan para pemangku kepentingan serta untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang belum konsisten berdasarkan variabel ukuran dewan komisaris, komite manajemen risiko, ukuran perusahaan, dan kepemilikan publik terhadap pengungkapan *enterprise risk management*. Tarantika, RA dan Solikhah, B (2019) dan Sulistyaningsih dan Gunawan (2016) menyimpulkan bahwa ukuran dewan

komisaris berpengaruh signifikan, sedangkan menurut Gunawan dan Zakiyah (2017) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh.

Komite manajemen risiko berpengaruh signifikan berdasarkan penelitian yang dilakukan Triyanti, DI (2019), dan Marhaeni dan Yanto (2015), tetapi menurut Kinasih, AP (2016) menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh. Menurut hasil penelitian Triyanti, DI (2019) dan Kinasih, AP (2016), ukuran perusahaan berpengaruh signifikan, sedangkan Marhaeni dan Yanto (2015) dan Edo dan Luciana (2013) menyimpulkan hasil yang tidak berpengaruh. Sulistyaningsih dan Gunawan (2016), dan Edo dan Luciana (2013) mengemukakan bahwa kepemilikan publik berpengaruh signifikan, sedangkan Tarantika, RA dan Solikhah, B (2019) dan Ardiansyah dan Adnan (2014) menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh.

Hal tersebut yang menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Publik Terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management* (Studi empiris pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018)”**. Tahun 2016-2018 dipilih karena periode tersebut merupakan periode tersedianya laporan keuangan terbaru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.
2. Apakah komite manajemen risiko berpengaruh terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.
4. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan diatas maka, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komite manajemen risiko terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris, komite manajemen risiko, ukuran perusahaan, dan kepemilikan publik terhadap pengungkapan *enterprise risk management* pada perusahaan industri barang konsumsi dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari penulis selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi manajemen, kreditur, investor, maupun *stakeholder* lain untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan investasi.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab dimana antar bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Ada pun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini mengutarakan gagasan yang mendasari penyusunan penelitian atau pokok permasalahan, rumusan masalah yang menjadi pertanyaan untuk

dilakukannya penelitian, tujuan yang akan dicapai dan manfaat yang diharapkan dari penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi penjelasan mengenai landasan teori, penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi/rujukan penulisan, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis penelitian yang diusulkan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional dan variabel, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris, komite manajemen risiko, ukuran perusahaan, dan kepemilikan publik terhadap pengungkapan *enterprise risk management* (studi empiris pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018).

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk seluruh pihak yang berkaitan dengan penelitian ini maupun untuk peneliti berikutnya.